

**DINAMIKA KOLABORASI *STAKEHOLDER* PADA PROGRAM
KONSERVASI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS (TNWK)**

(Skripsi)

Oleh

**IRMAYANTI
2216041005**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

DINAMIKA KOLABORASI *STAKEHOLDER* PADA PROGRAM KONSERVASI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS (TNWK)

Oleh

IRMAYANTI

Pengelolaan kawasan konservasi menghadapi tantangan yang semakin kompleks seperti kebakaran hutan, konflik satwa dan manusia, hingga perburuan liar akibat tekanan ekologis dan sosial yang tidak dapat ditangani oleh satu aktor secara mandiri. Kondisi tersebut menuntut penerapan pendekatan kolaboratif dalam pelaksanaan program konservasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika *collaborative governance* pada program konservasi di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), dengan fokus pada tiga program utama, yaitu perlindungan dan pengamanan kawasan, konservasi spesies terancam, serta pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan kerangka *Collaborative Governance Regime (CGR)* dengan menelaah konteks sistem, dinamika kolaboratif, tindakan kolaboratif, serta tantangan yang memengaruhi keberlangsungan kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dalam program konservasi di TNWK terbentuk sebagai respons terhadap kompleksitas permasalahan konservasi dan keterbatasan kapasitas pengelola kawasan. Dinamika kolaborasi berjalan relatif kuat pada program perlindungan dan pengamanan kawasan, bersifat teknis membutuhkan dukungan eksternal pada program konservasi spesies terancam, serta berfungsi sebagai penopang legitimasi sosial pada program pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, keberlanjutan kolaborasi masih menghadapi tantangan berupa dinamika sosial masyarakat sekitar kawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *collaborative governance* dalam program konservasi di TNWK telah terbentuk dan berjalan sebagai suatu rezim kolaboratif, meskipun masih memerlukan penguatan kapasitas dan kelembagaan agar kolaborasi dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Konservasi, TNWK

ABSTRACT

THE DYNAMICS OF STAKEHOLDER COLLABORATION AT THE WAY KAMBAS NATIONAL PARK (TNWK) CONSERVATION PROGRAM

By

IRMAYANTI

Conservation area management faces increasingly complex challenges such as forest fires, human-wildlife conflicts, and poaching due to ecological and social pressures that cannot be addressed by any single actor alone. These conditions demand the application of a collaborative approach in implementing conservation programs. This study aims to analyze the dynamics of collaborative governance in conservation programs in Way Kambas National Park (TNWK), focusing on three main programs: area protection and security, endangered species conservation, and community empowerment. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data collection was conducted through interviews, field observations, and documentation studies. Data analysis uses the Collaborative Governance Regime (CGR) framework by examining the system context, collaborative dynamics, collaborative actions, and challenges that influence the sustainability of collaboration. The results show that collaboration in conservation programs in TNWK was formed in response to the complexity of conservation issues and the limited capacity of area managers. Collaborative dynamics are relatively strong in area protection and security programs, technically requiring external support for endangered species conservation programs, and serve as a support for social legitimacy in community empowerment programs. However, the sustainability of collaboration still faces challenges in the form of social dynamics within the surrounding community. This study concludes that collaborative governance in the conservation program in TNWK has been formed and is running as a collaborative regime, although it still requires capacity and institutional strengthening so that collaboration can continue sustainably.

Key word: Collaborative Governance, Conservation, Way Kambas National Park

**DINAMIKA KOLABORASI *STAKEHOLDER* PADA PROGRAM
KONSERVASI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS (TNWK)**

Oleh

IRMAYANTI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **DINAMIKA KOLABORASI PADA
PROGRAM KONSERVASI TAMAN
NASIONAL WAY KAMBAS (TNWK)**

Nama Mahasiswa

: **Irmayanti**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2216041005**

Jurusan

: **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

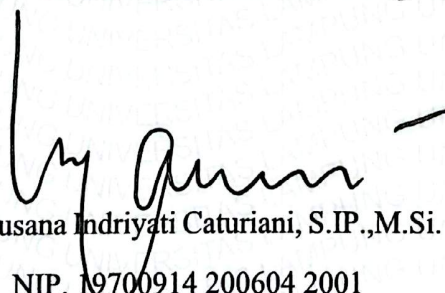
1. **Komisi Pembimbing**



A yellow circular stamp with a pink lotus flower in the center is placed over the signature of Dr. Ani Agus Puspawati.

**Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP.
NIP. 198308152010122002**

2. **Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**



A large, stylized black ink signature is placed over the name and NIP of Dr. Susana Indriyati Caturiani.

**Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.
NIP. 19700914 200604 2001**

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP.

Penguji Utama : Dr. Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 3 Maret 2026
Yang membuat pernyataan,


Irmayanti
2216041005

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Irmayanti, lahir pada hari Jumat tanggal 5 September 2003 di Desa Rajabasa Lama, merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Sapto Handoko dengan Ibu Siti Masitoh, yang memiliki kakak perempuan bernama Diah Ayu Surya Putri.

Pendidikan pertama penulis ditempuh di TK Aisiyah Bustanul Atfal Rajabasa Lama pada tahun 2008-2010, kemudian dilanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar (SD) tepatnya di SDN 3 Rajabasa Lama sejak tahun 2010 sampai dengan 2016. Penulis menempuh pendidikan sekolah menengah di SMPN 1 Labuhan Ratu hingga tahun 2019, dan lulus dari SMAN 1 Labuhan Ratu pada tahun 2022. Setelah lulus sekolah, penulis kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Lampung pada Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Saat menjadi mahasiswa Jurusan Administrasi Negara, penulis ikut serta dalam mata kuliah kewirausahaan dan memulai usaha. Penulis telah menjalankan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Juli hingga Agustus 2025 di Balai Taman Nasional Way Kambas, serta menyelesaikan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Canggung, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan pada bulan Januari sampai dengan Februari 2025.

MOTTO

“

“...Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (Q.S. Al Baqarah (2):216)

“I am a Saiyaara (Bintang paling bersinar diantara jutaan bintang)”

PERSEMBAHAN

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT

Tuhan yang Maha Esa atas segala Ridho dan Karunia-Nya.

*Gelar ini, dengan sepenuh hati ku persembahkan untuk kedua orang tuaku
tercinta dan seluruh keluarga yang telah mendukung dan mendoakan dari
awal sampai akhir.*

*Kepada dosen dan guru yang sangat berjasa dalam setiap ilmu yang
diberikan.*

Almamater tercinta “Universitas Lampung”

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, petunjuk, keberkahan, ridho, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Dinamika Kolaborasi pada Program Konservasi Di Taman Nasional Way Kambas”** sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara di Universitas Lampung. Karena proses penyusunan skripsi yang dilakukan telah selesai, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, masukan, dan dukungan kepada:

1. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP. selaku dosen pembimbing utama atas segala bimbingan, saran, dan masukan yang membangun selama proses penyusunan skripsi;
2. Ibu Dr. Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembahas yang telah memberikan bimbingan, arahan, waktu, dan pengetahuannya yang berharga kepada penulis, sehingga penulis dapat sampai di titik akhir proses penyelesaian skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S. selaku dosen pembimbing akademik yang telah mengayomi, membimbing, mengarahkan, serta memberi pengetahuan berharga kepada penulis selama menjadi mahasiswa Administrasi Negara di Universitas Lampung;
4. Ibu Prof. Dr Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
5. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiyani, S.IP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
6. Seluruh dosen dan staf jurusan Ilmu Administrasi Negara. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas ilmu pengetahuan, wawasan, dan pembelajaran berharga yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan.

7. Bapak MHD. Zaidi, S.Hut., M.A.P. selaku Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di kawasan TNWK, serta seluruh staff Balai TNWK yang turut membantu dalam proses penelitian skripsi penulis;
8. Bapak Sapto Handoko, ayah tersayang yang paling penulis banggakan dan kagumi, yang kata-kata sayangnya jarang terdengar namun tindakan afeksinya sangat terlukis di sanubari. Terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan, dan doa tulus yang telah diberikan, sehingga menjadi kekuatan yang sangat berarti kepada penulis hingga detik ini;
9. Ibu Siti Masitoh tersayang yang paling penulis cintai, rasa syukur tidak terhenti penulis ucapkan kepada-Nya hingga memiliki sosok ibu terbaik di kehidupan ini. Terima kasih atas segala doa yang tidak pernah lelah dilantunkan, kasih sayang yang tidak pernah terputus, serta dukungan material serta moral yang ditujukan kepada penulis selama ini;
10. Kakak perempuan terkasih Diah Ayu Surya Putri, S.Pd., Gr. dan Kakak ipar Dery Septiansyah, A.Md. yang telah menjadi sosok kakak paling mengayomi, pendengar terbaik, dan pemberi solusi atas segala masalah di hidup penulis. Rasa syukur tak terkira penulis ucapkan kepada Tuhan karena telah memberikan kakak terbaik di dunia ini;
11. Keponakan tersayang Muhammad Razka Athariansyah dan Muhammad Alghifari Athariansyah si kecil yang menggemaskan yang selalu menjadi penghibur penulis;
12. Sahabat tersayang di “*Yamaha Oren*” yakni Lily Rahmawati, Mukhlisatun Ifah Afiari, Natalia Sutanti, Destri Nur Fadhillah, Indah Wira Muliana, Dira Safira, Raya Marlianti, Lathifa Puspita Ningrum, dan Lintang Dwi Hapsari yang telah menjadi warna di atas kanvas lukis kehidupan mahasiswa penulis. Terima kasih seluas-luasnya penulis ucapkan atas waktu menyenangkan, canda, tawa, serta cerita yang dibagikan bersama, semoga selalu terasa manis sampai tahun-tahun yang akan datang;

13. Sahabat tersayang di “*KKN Desa Canggung*” yakni Erni Nur Rahmawati, Tiara Cahya Mukti, Ibnu Razak Adhikutama, Rizky Nanda Febrio Adha, dan Ivana Sandya Kalista. Terima kasih seluas-luasnya penulis ucapkan atas waktu menyenangkan, canda, tawa, serta cerita yang dibagikan bersama, semoga selalu terasa manis sampai tahun-tahun yang akan datang;
14. Sahabat sekaligus rekan bisnis penulis Sukma Maulana dan Vivi Amelia yang telah menjadi teman dalam tumbuh dan menuliskan pengalaman baru dalam dunia wirausaha;
15. Rekan penelitian skripsi penulis di TNWK, yaitu Kak Ummu Anityaningrum, S.IP. yang telah menemani perjalanan penelitian penulis hingga akhir;
16. Sebagai penutup, rasa terima kasih penulis ucapkan sebesar-besarnya kepada Irmayanti yang telah berhasil mencapai fase ini, setelah semua keringat, air mata, jarak, dan kesulitan yang dihadapi, namun masih terus mencoba untuk menghadapi hari esok. Semoga selalu diberikan kelancaran, kemudahan, dan hal-hal baik di dunia ini untuk menjalani kehidupan selanjutnya.

Bandar Lampung, Maret 2026

Penulis

Irmayanti

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2. Landasan Teori.....	15
2.2.1 <i>Collaborative Governance</i>	15
2.2.2. Aktor Kebijakan Publik	22
2.2.3.Konservasi	24
2.3 Kerangka Berpikir.....	25
III. METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Lokasi Penelitian.....	27
3.3 Sumber Data.....	28
3.4 Fokus Penelitian	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6 Teknik Analisis Data	33
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	36

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Umum	39
4.1.1 Taman Nasional Way Kambas (TNWK).....	39
4.1.2 Aliansi Lestari Rimba Terpadu (ALeRT).....	47
4.1.3 Komunitas untuk Hutan Sumatera (KHS)	49
4.1.4 <i>Wildlife Conservation Society</i> (WCS)	52
4.1.5 Yayasan Badak Indonesia (YABI)	53
4.1.6 Kelompok Tani Hutan (KTH)	54
4.1.7 Masyarakat Mitra Polhut (MMP)	55
4.2 Hasil Penelitian	59
4.2.1 Konteks Sistem (<i>System Context</i>)	61
4.2.2 Dinamika Kolaboratif (<i>Collaborative Dynamics</i>)	68
4.2.3 Tindakan Kolaboratif (<i>Collaborative Actions</i>).....	76
4.2.4 Tantangan Kolaborasi.....	85
4.3 Pembahasan	88
4.3.1 Konteks Sistem (<i>System Context</i>).....	88
4.3.2 Dinamika Kolaboratif (<i>Collaborative Dynamics</i>)	92
4.3.3 Tindakan Kolaboratif (<i>Collaborative Actions</i>).....	97
4.3.4 Tantangan Kolaborasi.....	100
V. PENUTUP	104
5.1 Kesimpulan	104
5.2 Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	113

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 3. 1 Daftar informan.....	32
Tabel 4. 1 Tabel wilayah kerja Balai TNWK berdasarkan luas wilayah.....	41
Tabel 4. 2 Matriks hasil dinamika kolaborasi di TNWK.....	99
Tabel 4. 3 Matriks tantangan kolaborasi di TNWK.....	103

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2. 1 Kerangka Kerja Integratif <i>Collaborative Governance</i>	18
Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir	25
Gambar 3. 1 Teknik analisis data	34
Gambar 4. 1 Kantor Balai TNWK.....	41
Gambar 4. 2 Peta TNWK	42
Gambar 4. 3 Kantor ALeRT	48
Gambar 4. 4 Kantor markas komando KHS	50
Gambar 4. 5 Restorasi di arboretum ERU Baraja Harjosari	50
Gambar 4. 6 Gajah hasil <i>rescue</i> tim ERU	51
Gambar 4. 7 Kebakaran hutan TNWK.....	62
Gambar 4. 8 Lahan padi yang dirusak gajah.....	64
Gambar 4. 9 Kebun masyarakat yang berbatasan dengan hutan TNWK.....	65
Gambar 4. 10 Penemuan pasir di dalam hutan TNWK.....	65
Gambar 4. 11 Patroli gabungan.....	74
Gambar 4. 12 Penjagaan gajah liar	75
Gambar 4. 13 Observasi Kegiatan <i>Ground Check</i>	78
Gambar 4. 14 Kegiatan edukasi siswa	79
Gambar 4. 15 Persiapan Menanam Pohon di Restorasi Rawa Kidang.	80
Gambar 4. 16 Kegiatan anjangsana.....	81
Gambar 4. 17 Penyerahan alat berburu	82
Gambar 4. 18 Jaga malam mencegah gajah ke pemukiman	82

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Taman Nasional Way Kambas (TNWK) sebagai salah satu kawasan konservasi penting di Indonesia yang sering kali menghadapi fenomena, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), konflik satwa dan manusia, serta perburuan satwa dilindungi yang menjadi ancaman serius terhadap kelestarian ekosistem di TNWK yang bermanifestasi dalam bentuk deforestasi bersifat masif. Aktivitas ilegal ini secara sistematis menggerus batas-batas kawasan konservasi, mengubah lanskap hutan yang vital menjadi area perkebunan atau permukiman. Dampak yang paling signifikan dari perambahan ini adalah fragmentasi habitat, yang secara langsung memutus habitat alami satwa. Kondisi ini memaksa spesies eksotik di TNWK seperti Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris sondaica*), Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*), Beruang, Siamang, dan spesies lain keluar dari habitatnya untuk mencari makanan atau ruang jelajah, dan pada akhirnya menyebabkan mereka memasuki wilayah yang ditinggali manusia.

Fenomena karhutla sering kali terkait erat dengan praktik ilegal pembukaan lahan. Berdasarkan data resmi dari Sistem Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan Sipongi di tahun 2024 luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung terindikasi mencapai 13.242,01 hektare. Luas kebakaran hutan dan lahan tersebut dihitung berdasarkan analisis citra satelite Landsat8 OLI/TIRS yang di-overlay dengan data sebaran hotspot, laporan hasil *groundcheck hotspot* dan laporan pemadaman yang dilaksanakan Manggala Agni. (Sipongi Kemenhut, 2025)

Dalam prariset yang telah dilakukan, berdasarkan observasi penulis saat sesi pemaparan rencana penelitian skripsi mahasiswa lain salah satu staf Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) di Balai TNWK menyebutkan bahwa satu kejadian kebakaran hutan dapat mencapai skala yang sangat besar, berpotensi membakar hingga 200 hektare lahan. Dampak paling nyata dari kebakaran hutan adalah fragmentasi habitat yang meningkatkan frekuensi dan intensitas konflik antara manusia dan satwa liar yang menjadi indikator dari terganggunya keseimbangan ekologis. Konflik ini tidak terbatas pada kerusakan properti atau hasil pertanian, seperti pada kasus di bulan Juli, gajah memasuki area perkebunan dan persawahan warga desa Braja Asri, Way Jepara yang merusak perkebunan dan persawahan warga seluas 10 hektar. Selain kerugian materi, konflik satwa juga menjadi ancaman terhadap nyawa manusia maupun satwa itu sendiri, seperti perburuan satwa liar yang dilindungi sebagai respons atas konflik yang terjadi (Ardi Munthe, 2025)

Global Positioning System (GPS) tracking merupakan alat yang digunakan untuk memantau pergerakan suatu objek. Sebuah alat serupa yaitu *GPS Collar* dipasang di leher gajah liar sebagai bentuk mitigasi konflik gajah dan manusia menemukan bahwa faktor-faktor seperti ketersediaan pakan, jarak ke sumber air, dan jarak ke permukiman sangat memengaruhi pergerakan Gajah Sumatera di Taman Nasional Way Kambas. Hal ini menggambarkan hubungan langsung antara fragmentasi habitat dengan perilaku satwa, sekaligus mempertegas pentingnya kolaborasi konservasi yang memperhatikan kondisi ekologis dinamis (Santosa & Masyud, 2023). Tingginya konflik ini menunjukkan adanya kegagalan dalam strategi mitigasi yang ada dan menegaskan bahwa solusi konservasi tidak dapat dipisahkan dari upaya pemberdayaan dan perlindungan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Selain karhutla dan konflik satwa, perburuan satwa dilindungi juga menjadi ancaman serius. Aktivitas ini merujuk pada penangkapan atau pembunuhan satwa yang termasuk dalam daftar dilindungi secara hukum, baik untuk perdagangan maupun konsumsi. Dalam sebuah wawancara media lokal, Kepala Balai TNWK 2021 mencatat bahwa ditahun 2020 terdapat 22 ekor gajah mati tanpa gading dan gigi. Sebagian besar pemburu menggunakan jerat, perangkap kandang, maupun jerat kawat baja yang dipasang secara sistematis di kawasan hutan. Praktik ini tidak hanya mengancam populasi gajah Sumatra yang kian menurun, tetapi juga menimbulkan dampak ekologi jangka panjang karena hilangnya spesies kunci (Gautama, 2021).

Balai TNWK sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT), tidak memiliki kewenangan untuk menyusun program konservasi sendiri. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menyebutkan bahwasanya tugas Taman Nasional adalah melaksanakan program nasional yang dirumuskan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), sehingga fungsi utama UPT adalah memastikan implementasi kebijakan pusat di tingkat tapak. (Taman Nasional Way Kambas, 2025) Program konservasi yang sedang dijalankan oleh TNWK untuk melindungi spesies kunci dan ekosistem antara lain:

1) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan

Program perlindungan dan pengamanan kawasan bertujuan menjaga keutuhan kawasan taman nasional dari berbagai bentuk gangguan dan aktivitas ilegal yang dapat mengancam kelestarian hutan dan satwa liar. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

- a) Patroli rutin dan monitoring Kawasan;
- b) Pengawasan terhadap potensi perambahan dan perburuan;
- c) Pencegahan kebakaran hutan.

2) Konservasi Spesies Terancam

Program konservasi spesies terancam difokuskan pada perlindungan dan pemulihan populasi satwa liar yang memiliki tingkat keterancaman tinggi, khususnya Badak Sumatra dan Gajah Sumatra yang menjadi spesies kunci di Taman Nasional Way Kambas. Program ini mencakup upaya konservasi *in-situ* melalui perlindungan habitat alami serta konservasi *ex-situ* melalui pengelolaan fasilitas pendukung, seperti Sumatran Rhino Sanctuary (SRS), sebagai bagian dari strategi konservasi jangka panjang. Program ini juga terintegrasi dengan pemulihan ekosistem untuk mendukung keberlanjutan habitat satwa.

3) Pemberdayaan Masyarakat

Program Pemberdayaan Masyarakat diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat desa penyangga dalam mendukung pengelolaan dan konservasi kawasan taman nasional. Program ini dilakukan melalui *Compensation Scheme*. *Compensation Scheme* merupakan pemberdayaan untuk masyarakat yang lahannya dijadikan koridor satwa atau zona penyangga. Sistem ini mengurangi konflik manusia-satwa dan meningkatkan dukungan masyarakat, penguatan kapasitas masyarakat, pengembangan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi dan mitigasi konflik manusia-satwa. Pendekatan pemberdayaan ini diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap kawasan konservasi sekaligus membangun hubungan yang lebih harmonis antara pengelola kawasan dan masyarakat sekitar.

Keterkaitan ketiga program ini dengan fenomena lapangan menunjukkan bahwa arah kebijakan konservasi di TNWK bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga responsif terhadap persoalan paling mendesak yang dihadapi kawasan. Karhutla yang mengikis luasan hutan, konflik manusia-satwa yang memicu kerugian sosial-ekonomi, serta perburuan satwa yang mengancam kepunahan spesies kunci, seluruhnya diintervensi melalui kerangka program konservasi nasional. Dengan demikian, implementasi program di TNWK mencerminkan upaya sinergis antara mandat kelembagaan pusat dan kebutuhan nyata di lapangan, yang kemudian menjadi salah satu dasar bagi pentingnya kolaborasi multi-aktor dalam pengelolaan taman nasional ini.

Konservasi hutan bukan hanya berperan dalam menjaga alam melainkan juga memiliki peran terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan, diperlukan pemetaan yang lebih spesifik terhadap tujuan-tujuan SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang relevan. Dalam konteks konservasi hutan dan pengelolaan kawasan taman nasional seperti TNWK, terdapat tiga tujuan utama SDGs yang memiliki keterkaitan langsung dan saling beririsan, yaitu SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), SDG 15 (Kehidupan di Darat), dan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Ketiga tujuan ini merepresentasikan dimensi lingkungan, ekologi, dan tata kelola kolaboratif yang menjadi fondasi utama dalam praktik konservasi berkelanjutan (United Nations, 2025b)

1) SDG 13 Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*)

SDG 13 menekankan pentingnya tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, termasuk melalui penguatan ketahanan, adaptasi, serta integrasi isu iklim dalam perencanaan kebijakan nasional dan lokal. Tujuan ini tercantum dalam agenda global 2030 yang dicanangkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang sudah terjadi.

Dalam konteks konservasi hutan TNWK, fungsi hutan dalam menyerap dan menyimpan karbon melalui proses fotosintesis secara langsung mendukung penurunan konsentrasi CO₂ di atmosfer dan memperlambat laju pemanasan global sudah dalam tahap perencanaan yang matang dan telah mencapai tahapan diskusi publik yang melibatkan masyarakat dan akademisi. Hal ini akan menjadi yang pertama di Indonesia, sehingga sejalan dengan target SDG 13 mengenai mitigasi perubahan iklim. Penelitian juga menunjukkan bahwa konservasi berkelanjutan adalah salah satu strategi utama mendukung pencapaian tujuan iklim, karena menjaga tutupan vegetasi dan fungsi ekosistem hutan membantu memperkuat kapasitas adaptasi masyarakat dan menurunkan risiko bencana iklim (United Nations, 2025a)

2) SDG 15 Kehidupan di Darat (*Life on Land*)

SDG 15 bertujuan untuk melindungi, memulihkan, dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, termasuk pengelolaan hutan secara lestari, memerangi deforestasi, serta menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan hilangnya keanekaragaman hayati. Perspektif ini menegaskan bahwa hutan bukan hanya habitat bagi ribuan spesies flora dan fauna, tetapi juga merupakan komponen fundamental dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang menyediakan jasa lingkungan penting, seperti pengaturan siklus air, penyimpanan karbon, dan stabilitas tanah. Konservasi hutan di taman nasional atau kawasan konservasi berperan langsung dalam memenuhi target-target SDG 15 dengan menjaga fungsi ekologis hutan dan mengurangi tekanan terhadap habitat alami. Risiko deforestasi yang tinggi dan penurunan kualitas habitat di banyak wilayah tropis menunjukkan urgensi memperkuat praktik konservasi melalui kebijakan, pengelolaan yang efektif, serta kolaborasi antar aktor, sebagaimana diuraikan dalam target-target SDG 15 yang ditetapkan oleh PBB (United Nations, 2025c)

3) SDG 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships for the Goals*)

SDG 17 menekankan perlunya memperkuat kemitraan global dan sarana implementasi SDGs untuk memastikan agenda pembangunan berkelanjutan dapat dicapai secara efektif oleh seluruh negara dan pemangku kepentingan. SDG 17 mencakup kolaborasi lintas sektor, termasuk kerjasama pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, serta komunitas lokal, yang bertujuan meningkatkan kapasitas implementasi melalui dukungan finansial, teknologi, serta berbagi pengetahuan. Dalam konteks konservasi hutan, kemitraan multipihak menjadi elemen kunci karena tantangan dalam pengelolaan ekosistem seringkali melibatkan aspek kompleks seperti konflik penggunaan lahan, pendanaan berkelanjutan, dan integrasi pengetahuan lokal dalam perencanaan konservasi. Studi kasus menunjukkan bahwa strategi konservasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat memperkuat praktik pelestarian dan memberi dampak yang lebih besar terhadap pelaksanaan SDGs secara holistik, khususnya ketika kemitraan tersebut mampu menyelaraskan tujuan konservasi dengan pembangunan sosial-ekonomi yang inklusif (United Nations, 2025b)

Upaya konservasi hutan di Indonesia tidak terlepas dari kerangka kebijakan dan landasan hukum yang kuat, yang menjadi fondasi bagi seluruh program konservasi, termasuk di TNWK. Secara normatif, pada tahun 2014 sampai 2025, pengelolaan konservasi berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dengan penekanan pada pengelolaan kolaboratif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 menjadi landasan utama. Standar normatif lain terkait konservasi juga tertuang dalam Rencana Strategis KLHK 2020–2024 dan kebijakan teknis Balai TNWK yang mengatur zonasi, perlindungan, dan kerja sama dengan mitra (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020)

Namun dalam praktiknya, terdapat ketimpangan antara ideal regulasi dan realita di lapangan. Program konservasi sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya yang mencakup keterbatasan dana operasional, jumlah personel yang tidak memadai. Keterbatasan ini membuat Balai TNWK tidak bisa bekerja sendiri. Mereka harus mengandalkan mitra kolaboratif seperti lembaga swadaya masyarakat (NGO) dan komunitas lokal yang memiliki sumber daya, dana, dan personel tambahan, serta partisipasi masyarakat

Dalam masa pra riset peneliti mengamati kondisi pengelolaan di TNWK menunjukkan serangkaian fenomena lapangan yang sangat kompleks, di mana ancaman kebakaran hutan yang merusak area pemulihan ekosistem serta konflik gajah-manusia yang terus berulang menjadi persoalan yang tidak mungkin diselesaikan oleh satu lembaga saja. Fenomena ini diperkuat dengan adanya fakta keterbatasan sumber daya yang kemudian bertemu dengan ketersediaan dukungan teknis serta pendanaan dari lembaga-lembaga mitra internasional. Di tingkat tapak, terlihat adanya aktivitas bersama seperti patroli gabungan antara petugas dan mitra hingga inisiatif warga dalam melakukan ronda malam secara mandiri untuk menjaga lahan pertanian mereka. Selain itu, terjadinya perubahan perilaku masyarakat yang semula dianggap sebagai pengganggu kawasan kini justru terlibat dalam kelompok tani hutan untuk menjaga kelestarian hutan menunjukkan adanya proses dialog dan kesepakatan kolektif yang sedang berjalan. Seluruh interaksi sosial, ketergantungan antar-aktor dalam berbagi peran, serta adanya aksi nyata di lapangan ini menjadi indikator kuat bahwa tata kelola di Way Kambas telah secara alamiah mengarah pada bentuk *Collaborative Governance* sebagaimana yang dijelaskan dalam model (Emerson et al., 2015)

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. (Prahara & Dewi, 2022) dalam penelitiannya mengenai *Collaborative Governance dalam Pengelolaan Ekowisata Taman Nasional Kerinci Seblat* menunjukkan bahwa keberhasilan konservasi sangat bergantung pada adanya keterlibatan aktif seluruh aktor melalui *principled engagement* dan *shared motivation*.

(Kurniawan et al., 2024) yang meneliti pengembangan ekowisata di Taman Nasional Ujung Kulon menemukan bahwa meskipun kolaborasi telah dijalankan, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan pemahaman masyarakat dan dominasi peran pemerintah. Studi lain oleh (Stiawati & Nuraeni, 2024) dalam konteks rehabilitasi mangrove di Kabupaten Pandeglang menunjukkan bahwa kolaborasi multipihak mampu mengatasi keterbatasan sumber daya, namun analisisnya lebih menekankan pada hasil program dibandingkan dinamika proses kolaborasi. Selain itu, (Wulandari, dkk., 2023) yang mengkaji kemitraan konservasi di Taman Nasional Way Kambas menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat, tetapi belum secara mendalam membahas interaksi, relasi kekuasaan, dan mekanisme kolaborasi antar aktor.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, terlihat bahwa kajian kolaborasi konservasi masih didominasi oleh evaluasi program dan peran aktor secara umum, sementara analisis mengenai dinamika kolaborasi menggunakan kerangka *Collaborative Governance Regime* (CGR), khususnya pada konteks konservasi hutan di Taman Nasional Way Kambas, masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang menjadi dasar penting bagi dilakukannya penelitian ini. Keterlibatan berbagai aktor mulai dari Balai TNWK, mitra strategis hingga masyarakat desa penyangga menyebabkan dinamika kolaborasi yang kompleks. Dengan kompleksitas tantangan yang dihadapi TNWK, mulai dari kebakaran hutan, konflik manusia-satwa, hingga perburuan satwa maka penelitian mengenai dinamika kolaborasi para pihak menjadi sangat penting untuk dilakukan

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kolaborasi dalam upaya konservasi hutan di TNWK. Secara spesifik, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah dinamika kolaborasi *stakeholder* pada program konservasi hutan?
2. Apa saja tantangan kolaborasi kolaborasi *stakeholder* pada program konservasi hutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis dinamika kolaborasi *stakeholder* pada program konservasi hutan.
2. Menganalisis tantangan kolaborasi *stakeholder* dalam melaksanakan program konservasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian tata kelola kolaboratif. Dengan menerapkan model *Collaborative Governance Regime* pada kasus spesifik konservasi hutan TNWK. Hasil studi ini akan menjadi referensi bagi penelitian lain yang berfokus pada dinamika kolaborasi, tidak hanya pada kegagalannya, tetapi juga pada faktor-faktor yang mendorong keberhasilannya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan praktis bagi para pihak yang terlibat dalam upaya konservasi hutan. Temuan mengenai faktor pendorong dan penghambat akan menjadi dasar bagi Balai TNWK dan mitra untuk merumuskan strategi kolaborasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan di bidang kehutanan serta lembaga konservasi lain di Indonesia untuk mengembangkan kerangka kerja kolaboratif yang lebih adaptif dan responsif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi pijakan penting dalam suatu karya ilmiah yang berfungsi memberikan pemahaman terkait isu yang sedang dikaji. Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi fokus permasalahan, pendekatan metodologis, serta temuan-temuan yang relevan, sehingga penelitian yang dilakukan dapat terarah dan mengisi celah pengetahuan yang masih ada. Dalam konteks penelitian ini, yang berjudul “Dinamika Kolaborasi Stakeholder Pada Program Konservasi di Taman Nasional Way Kambas (TNWK)” peneliti meninjau sejumlah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tata kelola kolaboratif, konservasi kawasan hutan, serta peran multi-stakeholder. Kajian ini diharapkan mampu memperkuat kerangka teoritis dan memberikan dasar empiris bagi analisis kolaborasi yang berlangsung

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Hasil
1.	<i>Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Ekowisata Taman Nasional Kerinci Seblat</i> (Prahara & Dewi, 2022).	Hasil menunjukkan bahwa ekowisata hanya akan berjalan berkelanjutan jika semua aktor memberikan dukungan aktif. Penelitian ini menunjukkan bagaimana <i>principled engagement</i> dan <i>shared motivation</i> diperlukan dalam kolaborasi antar stakeholder agar kolaborasi berhasil di taman nasional Indonesia.
2.	<i>A Collaborative Governance Perspective in Ecotourism Development in Ujung Kulon National Park</i> , Banten-Indonesia (Kurniawan et al., 2024)	Tata kelola kolaboratif dalam pengembangan ekowisata di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten menemukan bahwa meskipun model ini telah dijalankan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan utama mencakup kesenjangan pengetahuan di antara masyarakat lokal terkait konsep konservasi dan ekowisata, yang berdampak pada kualitas partisipasi mereka. Selain itu, lembaga kolaborasi seperti Pusat Pendidikan Konservasi Alam Berbasis Masyarakat (PPKBM) stagnan akibat faktor eksternal seperti gempa bumi dan pandemi

No.	Judul	Hasil
		COVID-19, serta masalah internal seperti kurangnya transparansi dan frekuensi pertemuan antar pihak. Penelitian ini juga menyoroti peran sentral Balai TNUK yang sangat berwenang, yang meskipun dapat menjadi kekuatan pendorong, juga dapat menjadi hambatan jika pengambilan keputusannya bersifat sepihak. Agar kolaborasi berjalan baik, penelitian ini merekomendasikan adanya pemahaman bersama, peningkatan partisipasi masyarakat, dan perubahan pendekatan dari pemerintah yang lebih inklusif dan terbuka
3.	<i>The Application of Collaborative Government in A Case Study of Cooperation to Protect Mangrove Forests in Benoa Bay Bali</i> (Syahputra Aryadi & Rassyia Putra, 2024)	Kerja sama penanaman bibit bakau di Teluk Benoa, Bali, menunjukkan bahwa kolaborasi antara Pemerintah Bali, komunitas Sahabat Mangrove Ranger, dan masyarakat umum merupakan contoh sukses tata kelola kolaboratif. Penelitian ini menggunakan teori Nasrulhaq (2020) dan menemukan bahwa kerja sama tersebut memenuhi empat indikator utama yang menunjukkan tata kelola kolaboratif yang baik. Pertama, terdapat orientasi konsensus karena semua pihak, meskipun memiliki visi berbeda, bersatu untuk mencapai tujuan bersama yaitu pelestarian alam dan lingkungan Bali. Kedua, kepemimpinan kolektif terlihat dari peran Gubernur Bali yang berhasil mengoordinasikan berbagai pihak dalam kegiatan penanaman. Ketiga, adanya komunikasi multidireksional yang intens dan berkelanjutan memungkinkan perencanaan kegiatan di masa depan dan mobilisasi partisipasi masyarakat. Terakhir, berbagi sumber daya dilakukan secara merata, dengan setiap pihak, termasuk pelajar dan masyarakat sekitar, mengirimkan sumber daya manusia untuk berpartisipasi aktif. Jurnal ini menyimpulkan bahwa kolaborasi tersebut tidak hanya menunjukkan kerja sama yang baik, tetapi juga merupakan tindakan nyata dalam mengatasi masalah lingkungan akibat reklamasi dan mewujudkan visi lingkungan yang berkelanjutan
4.	<i>Collaborative Governance in the Development of Mangrove Rehabilitation in Cigorondong Village Sumur District Pandeglang Regency</i> (Stiawati & Nuraeni, 2024)	Kolaborasi dalam rehabilitasi bakau di Desa Cigorondong, Pandeglang, berhasil diterapkan dan memberikan hasil yang positif. Kolaborasi ini menggunakan model Quadra Helix yang melibatkan empat pihak utama: pemerintah (Dinas Kelautan dan Perikanan), sektor swasta (PT Asahimas Chemical), akademisi (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa), dan organisasi non-pemerintah (Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia). Peran tata kelola kolaboratif di sini sangat penting karena berfungsi sebagai mekanisme efektif untuk menyatukan sumber daya dan keahlian yang berbeda dari masing-masing pihak. Berkat kolaborasi ini, program rehabilitasi yang sebelumnya terhambat masalah pendanaan bisa berjalan. Keberhasilan ini dianalisis menggunakan model Ansell dan Gash (2007) dan terbukti memenuhi kriteria seperti Kondisi Awal yang saling melengkapi, Desain Kelembagaan yang memiliki aturan jelas, Kepemimpinan Fasilitatif yang setara tanpa pemimpin tunggal, dan Proses Kolaborasi yang berjalan baik melalui dialog dan evaluasi rutin. Sebagai hasil nyatanya, lahan seluas 1 hektar berhasil direhabilitasi dengan penanaman 3.000 pohon bakau.

No.	Judul	Hasil
5.	<i>Enhancing Collaborative Governance in Managing Grand Forest Park in Riau, Indonesia</i> (Wardana et al., 2023)	Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) di Riau berhasil ditingkatkan melalui penerapan tata kelola kolaboratif. Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial yang dialami oleh pemerintah daerah menjadi pemicu awal kolaborasi ini. Dengan adanya kerja sama, berbagai pihak termasuk pemerintah, sektor swasta seperti Pertamina Hulu Rokan, akademisi dari Universitas Riau dan Institut Pertanian Bogor, serta Masyarakat terlibat aktif. Proses kolaborasi ini melibatkan beberapa tahap: dimulai dengan identifikasi masalah, lalu pembahasan dan penyatuan persepsi yang dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU), dilanjutkan dengan perumusan tujuan dan rencana aksi. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tahura berperan sebagai pemimpin fasilitatif yang memediasi komunikasi dan kerja sama antar pihak. Hasilnya, kolaborasi ini berhasil mengatasi konflik dengan masyarakat terkait penggunaan lahan, meningkatkan fungsi hutan sebagai "paru-paru kota", dan mengembangkan potensi Tahura sebagai tempat wisata dan pusat penelitian.
6.	Dinamika Kelompok dan Kemitraan Konservasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan Konservasi dalam Taman Nasional Meru Betiri (Prasetya et al., 2023).	Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara pihak taman nasional dan masyarakat mengenai tujuan program, seperti kewajiban menanam tanaman pokok, yang berdampak pada implementasi program yang kurang optimal. Meskipun kelompok LMDHK dinamis dan kohesif, dinamika kelompok itu sendiri tidak memiliki hubungan signifikan dengan keberhasilan penerapan program. Sebaliknya, karakteristik individu anggota seperti usia dan kepemilikan media komunikasi justru memiliki hubungan yang nyata terhadap penerapan program
7.	Kemitraan Multi Pihak dalam Pelestarian Ekosistem Hutan di Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 (Tandir dkk., 2024)	Jurnal ini mengkaji kemitraan multi-pihak dalam pelestarian ekosistem hutan di Kalimantan Tengah dari tahun 2016 hingga 2020. Penelitian ini menemukan bahwa deforestasi dan kebakaran hutan merupakan tantangan utama yang disebabkan oleh alih fungsi lahan untuk perkebunan dan pertambangan. Untuk mengatasinya, pelestarian hutan memerlukan kerja sama terkoordinasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, NGO, swasta, dan masyarakat, sesuai dengan landasan hukum yang ada. Meskipun banyak kemitraan telah terjalin, masih diperlukan penguatan koordinasi dan transparansi untuk mengatasi konflik kepentingan dan keterbatasan sumber daya.
8.	<i>Investigating Innovative Models of Governance and Collaboration for Effective Public Administration in a Multi-Stakeholder Landscape</i> (Temitope, 2023)	Studi ini menyoroti pentingnya pendekatan baru yang melibatkan kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi sektor swasta, dan kelompok masyarakat sipil untuk mengatasi tantangan sosial yang kompleks. Studi ini menyimpulkan bahwa dengan mengadopsi model-model inovatif seperti tata kelola kolaboratif dan kolaborasi lintas sektor, administrasi publik dapat menumbuhkan kerja sama, inklusivitas, dan penyelesaian masalah kolektif di antara para pemangku kepentingan.
9.	Peran Kader Konservasi Sebagai Mitra Taman Nasional Alas Purwo Dalam Upaya Pelestarian Alam (Setiawan, 2021)	Jurnal ini menganalisis peran kader konservasi sebagai mitra Taman Nasional Alas Purwo (TNAP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kader konservasi berfungsi sebagai garda terdepan dan pelopor dalam upaya pelestarian alam. Peran mereka mencakup inisiator,

No.	Judul	Hasil
		motivator, fasilitator, dan mitra pembangunan, yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Jurnal ini menekankan bahwa kerusakan sumber daya alam hayati, seperti deforestasi, berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan.
10.	Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Kemitraan Konservasi Pemulihan Ekosistem Rawa Bunder di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) (Wulandari, dkk., 2023)	Jurnal ini merupakan hasil dari program pengabdian masyarakat yang berfokus pada kemitraan konservasi untuk memulihkan ekosistem Rawa Bunder di Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Studi ini menekankan bahwa keberhasilan suatu program konservasi memerlukan partisipasi dan komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat. Jurnal ini menyoroti pentingnya pengelolaan kolaboratif, terutama dengan melibatkan masyarakat lokal yang memiliki kearifan dan aturan adat.

Sumber: Diolah peneliti, 2025

Kolaborasi menjadi elemen yang tidak terhindarkan dan krusial dalam pengelolaan kawasan konservasi serta isu-isu lingkungan yang kompleks. Penelitian-penelitian tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa pendekatan hierarkis tidak lagi memadai untuk mengatasi masalah seperti deforestasi, konflik lahan, atau rehabilitasi ekosistem. Pemerintah seringkali memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan finansial. Melalui kolaborasi dengan swasta, akademisi, dan NGO, sumber daya dan keahlian yang berbeda dapat disatukan secara efektif untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Selain itu keterlibatan aktif dari masyarakat lokal juga menjadi salah satu kunci keberhasilan mengatasi masalah.

Penelitian terdahulu telah mengkaji isu tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, sebagian besar studi cenderung bersifat evaluatif dan belum secara mendalam menganalisis dinamika proses kolaborasi yang sesungguhnya. Penelitian-penelitian tersebut juga banyak menggunakan model teoretis lain sehingga pemahaman tentang penerapan model *Collaborative Governance Regime* (CGR) secara spesifik masih terbatas. Penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi teoretis dengan mengaplikasikan kerangka CGR sebagai alat analisis utama, dengan fokus pada:

- 1) Konteks Sistem (*System Context*), yang meliputi faktor-faktor eksternal yang memicu dan membentuk kolaborasi, seperti kondisi lingkungan seperti deforestasi di TNWK, kerangka hukum, dan iklim politik-sosial.

- 2) Dinamika Kolaboratif (*Collaborative Dynamics*) yang mengkaji bagaimana para pihak berinteraksi dan membangun hubungan. Dimensi ini terdiri dari tiga elemen kunci yaitu *Principled Engagement* yang berfokus pada bagaimana para pihak memulai komunikasi, membangun kepercayaan, dan berdialog. *Shared Motivation* yang membahas bagaimana mereka menemukan tujuan bersama, mendapatkan legitimasi, dan membangun komitmen, serta *Capacity for Joint Action* yang mengacu pada cara mereka mengelola dan mengumpulkan sumber daya untuk bertindak bersama.
- 3) Tindakan Kolaboratif (*Collaborative Actions*), yang berfokus pada tindakan konkret dan hasil nyata dari kolaborasi tersebut, seperti pembagian peran, implementasi program di lapangan, dan koordinasi sumber daya. Melalui ketiga dimensi ini, model CGR memungkinkan analisis mendalam tentang proses kolaborasi, bukan hanya hasil akhirnya. Penelitian ini akan memperkaya literatur ilmu administrasi publik dan memberikan pemahaman dinamika kolaborasi dan faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat kolaborasi di TNWK.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Collaborative Governance

a. *Collaborative Governance Regime* (CGR) yang dikembangkan oleh (Emerson & Woo, 2022) sebagai kerangka analisis utama. Konsep ini membedah kolaborasi bukan hanya sebagai sebuah proyek, melainkan sebagai sebuah rezim atau sistem interaksi yang berkelanjutan. Fokus utama dari model ini adalah pada dinamika proses yang terjadi di antara para aktor, memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang *bagaimana* kolaborasi itu berjalan, bukan hanya apa hasil akhirnya. Model CGR melihat kolaborasi sebagai sebuah siklus yang dipengaruhi oleh tiga dimensi utama:

1) Konteks Sistem (*System Context*)

Dimensi ini mencakup semua faktor eksternal yang ada di luar ruang kolaborasi, yang memicu dan membentuk kolaborasi itu sendiri. Elemen-elemen dalam dimensi ini berfungsi sebagai pemicu (*drivers*) yang menggerakkan para aktor untuk berkolaborasi. Dalam penelitian ini, analisis akan difokuskan pada:

a) Faktor Pemicu (*drivers*)

Mengidentifikasi isu-isu kritis yang menuntut respons kolaboratif, seperti ancaman kebakaran hutan, konflik manusia-satwa, dan perburuan satwa yang masif di TNWK.

b) Kondisi Lingkungan

Mengkaji kondisi sosial-politik, ekonomi, dan lingkungan yang ada, seperti adanya kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung atau menghambat, serta iklim kepercayaan yang telah terbangun di antara para pihak.

2) Dinamika Kolaboratif (*Collaborative Dynamics*)

Inti dari model CGR yang menjelaskan bagaimana proses interaksi antarpihak berlangsung. Dimensi ini membedah mekanisme internal yang memungkinkan para aktor untuk berinteraksi secara konstruktif. Tiga sub-elemen utama dalam dinamika kolaboratif akan dianalisis secara terperinci:

a) *Principled Engagement*

Menganalisis bagaimana para aktor membangun hubungan dan berinteraksi. Ini mencakup proses *trust-building* (membangun kepercayaan), dialog terbuka, dan negosiasi untuk mengatasi perbedaan. Analisis akan mengkaji seberapa efektif para pihak saling mendengarkan dan menghargai pandangan satu sama lain.

b) *Shared Motivation*

Menjelaskan bagaimana para aktor, meskipun dengan kepentingan yang berbeda, menemukan tujuan dan komitmen bersama. Fokusnya adalah pada pembentukan visi kolektif, saling pengertian, dan legitimasi yang mengikat mereka dalam satu alur kolaborasi.

c) *Capacity for Joint Action*

Menganalisis ketersediaan dan pengelolaan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kolaborasi. Ini termasuk kapasitas struktural (peran dan mekanisme kerja), kapasitas prosedural (aturan dan norma yang disepakati), dan kapasitas sumber daya (personel, dana, teknologi, dan keahlian) yang mendukung tindakan bersama.

3) Tindakan Kolaboratif (*Collaborative Actions*)

Dimensi ini mengacu pada hasil konkret dan program-program yang dihasilkan dari proses kolaborasi. Ini adalah manifestasi nyata dari dinamika yang terjadi sebelumnya. Analisis Tindakan kolaboratif berfokus pada:

a) Pembagian Peran dan Tugas

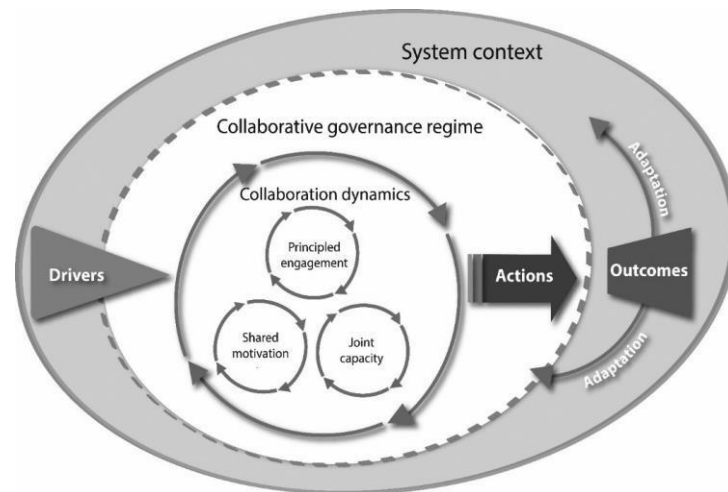
Mengidentifikasi bagaimana peran dan tanggung jawab didistribusikan di antara para aktor untuk mengimplementasikan program-program konservasi.

b) Aktivitas Lapangan

Mengevaluasi berbagai program yang telah dilaksanakan, seperti patroli gabungan, kegiatan mitigasi konflik, rehabilitasi hutan, dan pemberdayaan masyarakat.

c) Evaluasi Hasil

Menganalisis dampak dari tindakan-tindakan ini terhadap isu-isu yang ada di Konteks Sistem (misalnya, penurunan angka deforestasi atau frekuensi konflik).



Gambar 2. 1 Kerangka Kerja Integratif *Collaborative Governance*.

Sumber: (Emerson & Woo, 2022)

- b. (Ansell & Gash, 2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai pengaturan formal dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung mengikutsertakan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus. Pendekatan ini muncul sebagai alternatif dari model tata kelola tradisional yang bersifat adversarial atau manajerial. Ansell dan Gash (2008) mengembangkan sebuah model kontingensi yang mengidentifikasi empat prasyarat utama agar kolaborasi dapat berjalan sukses: kondisi awal yang mendorong di dalamnya termasuk sejarah konflik dan insentif, desain kelembagaan yang memadai, kepemimpinan fasilitatif, dan proses yang berkelanjutan. Model ini menekankan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada bagaimana para pihak terlibat dalam dialog tatap muka, membangun kepercayaan, dan mengembangkan pemahaman serta komitmen bersama.

c. (Duadji & Tresiana, 2018) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai sebuah proses tata kelola yang melibatkan lebih dari satu aktor dalam menyelesaikan masalah publik yang kompleks. Konsep ini berfokus pada pendekatan dialog dan konsensus di antara para aktor, di mana kekuasaan dan tanggung jawab tidak lagi bersifat hierarkis, melainkan dibagi bersama. Jurnal ini juga menggarisbawahi beberapa elemen kunci dari kolaborasi, yaitu

- 1) Saling ketergantungan (*interdependence*), di mana para aktor menyadari bahwa mereka tidak dapat menyelesaikan masalah sendirian.
- 2) Aktor jamak (*multiple actors*), yang tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga pihak swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas untuk mencapai tujuan yang sama.
- 3) Proses formal (*formal process*) kolaborasi dipandang sebagai sebuah proses formal terstruktur, melibatkan perjanjian, kerangka kerja, atau mekanisme yang jelas untuk pengambilan keputusan dan implementasi.

d. (Weber et al., 2005) memandang bahwa keberhasilan *collaborative governance* sangat ditentukan oleh adanya integrasi fungsi antar aktor yang terlibat dalam proses pemerintahan. Integrasi tersebut tidak hanya mencakup fungsi birokrasi, tetapi juga melintasi berbagai arena kebijakan, tingkat pemerintahan, serta melibatkan partisipasi warga negara dan organisasi non-pemerintah. Dalam kerangka ini, masyarakat dan aktor non-pemerintah tidak ditempatkan sebagai pihak pasif, melainkan sebagai bagian penting dalam proses pemecahan masalah publik dan pelaksanaan kebijakan.

Lebih lanjut, Weber et al. (2005) mengemukakan tiga dimensi utama dalam kolaborasi pemerintahan yaitu:

- 1) Dimensi vertikal yang menggambarkan hubungan hierarkis antara lembaga pemerintah dengan aktor lain, termasuk pemerintah pada tingkat berbeda, warga negara, dan organisasi non-pemerintah.
- 2) Dimensi horizontal, yang merujuk pada pola interaksi antar organisasi yang memiliki kedudukan relatif setara.

- 3) Dimensi kemitraan, yang merupakan kombinasi antara dimensi vertikal dan horizontal, sehingga membentuk pengaturan kolaboratif yang lebih adaptif dan efektif dalam mengelola permasalahan publik yang kompleks.
- e. (Ratner, 2012) *collaborative governance* merupakan suatu proses yang berlangsung secara bertahap dan berfokus pada dinamika interaksi antar pemangku kepentingan. Menurutnya, kolaborasi tidak terjadi secara instan, melainkan melalui tiga fase utama yang saling berkaitan dan membentuk alur proses kolaboratif.
- 1) Fase pertama adalah identifikasi hambatan dan peluang (*identifying obstacles and opportunities*), yang menekankan pada proses mendengarkan secara aktif. Pada tahap ini, para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi mengemukakan berbagai hambatan, tantangan, dan permasalahan yang berpotensi muncul dalam proses kolaboratif. Setiap aktor memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman, sementara aktor lainnya berperan untuk mendengarkan dan memahami permasalahan tersebut. Selain mengidentifikasi hambatan, fase ini juga diarahkan untuk mengenali peluang dan potensi solusi yang dapat dimanfaatkan bersama, termasuk capaian yang mungkin diperoleh oleh masing-masing pihak dari proses kolaborasi yang dijalankan.
 - 2) Fase kedua adalah perumusan strategi melalui dialog dan debat (*debating strategies for influence*). Pada tahap ini, kolaborasi memasuki ruang dialog yang lebih intensif, di mana para pemangku kepentingan mendiskusikan berbagai hambatan yang telah diidentifikasi sebelumnya serta merumuskan strategi yang dianggap paling efektif untuk mengatasinya.
- Proses diskusi tidak hanya berfokus pada pemilihan alternatif solusi, tetapi juga pada identifikasi aktor atau pihak-pihak yang memiliki kapasitas dan pengaruh untuk mendukung penyelesaian permasalahan dalam kerangka kolaborasi.

- 3) Fase ketiga adalah perencanaan tindakan kolaboratif (*planning collaborative actions*). Setelah tercapai kesepakatan mengenai permasalahan dan strategi yang akan ditempuh, para pemangku kepentingan mulai menyusun rencana implementasi dari strategi tersebut. Tahap ini mencakup penentuan langkah-langkah awal dalam pelaksanaan kolaborasi, pembagian peran dan tanggung jawab, serta perumusan indikator atau ukuran untuk memantau proses kolaboratif. Selain itu, pada fase ini juga dirancang mekanisme untuk menjaga keberlanjutan kolaborasi agar dapat berlangsung secara konsisten dalam jangka panjang.

Berdasarkan berbagai model *collaborative governance* yang telah diuraikan, penelitian ini memilih *Collaborative Governance Regime* yang dikembangkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) sebagai kerangka analisis utama. Pemilihan model ini didasarkan pada kemampuannya dalam memandang kolaborasi bukan sekadar sebagai pengaturan formal atau tahapan proses, melainkan sebagai suatu sistem interaksi yang dinamis dan berkelanjutan. Berbeda dengan model Ansell dan Gash (2008) yang menitikberatkan pada prasyarat dan proses dialog menuju konsensus, atau Ratner (2012) yang menekankan tahapan kolaborasi secara linear, model CGR menawarkan kerangka analisis yang lebih komprehensif dengan mengaitkan konteks sistem, dinamika internal kolaborasi, dan tindakan kolaboratif dalam satu siklus yang saling memengaruhi. Selain itu, model Weber et al. (2005) dan Duadji & Tresiana (2018) memberikan penekanan penting pada integrasi fungsi dan keterlibatan multiaktor, namun belum secara eksplisit menguraikan mekanisme internal yang menjelaskan bagaimana interaksi tersebut berkembang dan menghasilkan tindakan bersama. Oleh karena itu, CGR dipandang paling relevan untuk menganalisis kolaborasi dalam pengelolaan konservasi hutan di Taman Nasional Way Kambas, karena mampu menangkap kompleksitas hubungan antar aktor, dinamika kepercayaan dan motivasi bersama, serta kapasitas kelembagaan yang memengaruhi keberlanjutan kolaborasi dalam jangka panjang.

2.2.2. Aktor Kebijakan Publik

Dalam proses kebijakan publik, aktor merupakan subjek yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Aktor kebijakan sebagai individu atau kelompok yang memiliki kepentingan, sumber daya, atau kewenangan untuk memengaruhi jalannya suatu kebijakan publik. Aktor tidak hanya terbatas pada institusi pemerintah, tetapi juga mencakup aktor non-pemerintah seperti organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, media, hingga komunitas lokal (Anderson, 2021)

Aktor kebijakan publik didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang terlibat dalam interaksi dan tindakan terarah untuk menangani masalah yang menjadi perhatian publik. Keberadaan mereka sangat memengaruhi kebijakan publik, bersama dengan elemen-elemen lain seperti konten, konteks, dan proses kebijakan. Aktor-aktor ini terlibat dalam seluruh siklus kebijakan, mulai dari penetapan agenda hingga evaluasi. Mereka memiliki tujuan spesifik yang ingin dicapai dan menggunakan berbagai sumber daya, termasuk sumber daya ekonomi, politik, dan informasi, untuk memengaruhi proses kebijakan. Interaksi antar aktor terjadi dalam berbagai arena kebijakan, baik formal seperti lembaga pemerintahan) maupun non-formal seperti kelompok masyarakat dan media (Rusdiyanta dkk., 2022)

Aktor kebijakan publik adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan. Aktor kebijakan publik tidak hanya terdiri dari para pembuat kebijakan, melainkan juga akademisi, analis kebijakan, dan warga negara yang secara individu maupun terorganisasi dalam kelompok kepentingan. Interaksi antaraktor ini sering kali kompleks dan memengaruhi hasil kebijakan, dan hal ini dipandang sebagai serangkaian interaksi yang kompleks dan memengaruhi hasil kebijakan. Penekanan pada peran aktor swasta dan non-pemerintah ini menandai pergeseran dari fokus eksklusif pada sektor publik ke pengakuan pentingnya kolaborasi dalam model pemerintahan modern.

Dengan demikian, aktor kebijakan publik digambarkan sebagai "kumpulan yang sangat kompleks" dari berbagai individu dan organisasi yang memiliki kepentingan, nilai, dan preferensi yang berbeda, yang pada akhirnya membentuk arah dan hasil kebijakan (Peters & Pierre, 2006)

Dalam pengelolaan (TNWK), keberhasilan konservasi sangat bergantung pada interaksi antara berbagai aktor kebijakan publik. Aktor-aktor ini bukan sekadar institusi pemerintah, melainkan sebuah "kumpulan yang sangat kompleks" dari individu dan organisasi dengan kepentingan, nilai, dan preferensi yang beragam. Di TNWK, aktor-aktor ini secara spesifik mencakup. Balai TNWK, yang memiliki kewenangan formal, serta para akademisi dan analis kebijakan yang berkontribusi melalui riset. Selain itu, organisasi non-pemerintah dan kelompok kepentingan berperan aktif dalam memengaruhi proses kebijakan, sementara warga negara dan komunitas lokal menjadi aktor kunci karena ketergantungan mereka pada sumber daya alam (Anderson, 2021; Peters & Pierre, 2006; Rusdiyanta dkk., 2022)

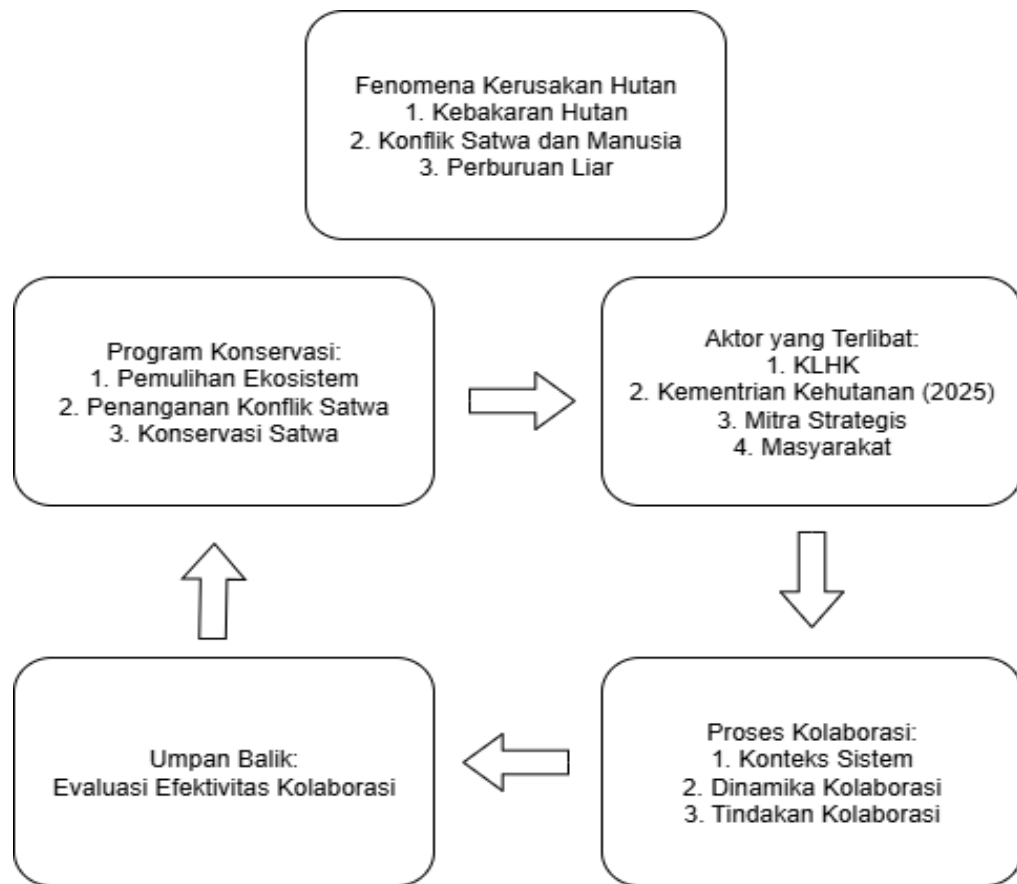
Interaksi ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pengelolaan yang sentralistik ke model yang menekankan kolaborasi. Berbagai aktor ini terlibat dalam seluruh siklus kebijakan, dari penetapan agenda hingga evaluasi, dengan tujuan spesifik yang ingin dicapai. Dengan memahami peran masing-masing aktor dan dinamika kompleks yang terjadi di antara mereka, Balai TNWK dapat merumuskan strategi pengelolaan yang lebih efektif. Hal ini memungkinkan terciptanya keseimbangan antara tujuan konservasi, kebutuhan ekonomi masyarakat, dan kepentingan semua pihak yang terlibat, yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan upaya pelestarian TNWK.

2.2.3. Konservasi

Konservasi diartikan sebagai tindakan untuk mengawetkan sesuatu dari pengaruh merusak atau mencegah kehilangan dan kepunahan. Tujuan utama dari konservasi adalah mewujudkan kelestarian sumber daya alam serta keseimbangan ekosistemnya demi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan kehidupan manusia (Rahman et al., 2020). Dalam konteks hukum di Indonesia, landasan ini diperkuat oleh Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menjadi payung hukum bagi pengelolaan kawasan konservasi seperti TNWK yang kemudian diperbarui dalam Perdirjen KSDAE No. 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Safitri, et al., 2023).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan konservasi sumber daya alam sebagai pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan kesinambungan ketersediaannya, dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Konservasi didefinisikan sebagai upaya efisiensi dalam penggunaan energi, perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang hati-hati, pengelolaan kuantitas yang stabil dalam reaksi kimia atau transformasi fisik, perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan, serta keyakinan bahwa habitat alami dapat dikelola untuk mempertahankan keanekaragaman genetik spesies (Darmayani dkk., 2022).

2.3 Kerangka Berpikir



Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir

Sumber: diolah peneiti, 2025

Kerangka pikir penelitian ini didasarkan pada model *collaborative governance* (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012) yang menjelaskan bahwasanya kolaborasi terbentuk dari konteks sistem yang mendorong aktor-aktor untuk bekerja sama, kemudian berkembang melalui dinamika interaksi, menghasilkan tindakan nyata, dan akhirnya menciptakan umpan balik bagi keberlanjutan. Dalam konteks TNWK, permasalahan kebakaran hutan, konflik manusia-satwa liar, dan perburuan menjadi latar belakang lahirnya kolaborasi antara Balai TNWK, mitra strategis WCS-IP, ALeRT, YABI, KHS, dan masyarakat lokal. Kolaborasi ini berlangsung melalui tiga dinamika utama, yaitu *principled engagement* yang mencakup dialog terbuka,

pembangunan kepercayaan, dan penghargaan terhadap perspektif; *shared motivation* yang meliputi tujuan bersama, komitmen, serta legitimasi antar pihak; dan *capacity for joint action* berupa ketersediaan serta pembagian sumber daya, pemanfaatan keahlian kolektif, dan mekanisme koordinasi yang jelas. Dinamika ini kemudian menghasilkan tindakan kolaboratif dalam bentuk implementasi program konservasi bersama, pembagian peran, serta koordinasi operasional di lapangan. Seluruh proses tersebut akhirnya menciptakan umpan balik yang memungkinkan evaluasi efektivitas kolaborasi dalam menjawab persoalan awal, sekaligus memperkuat keberlanjutan upaya konservasi hutan di TNWK melalui siklus perbaikan berkelanjutan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena esensi dari penelitian ini adalah untuk menggali dan memahami fenomena sosial secara mendalam. Fokusnya bukan pada generalisasi data numerik, melainkan pada rekonstruksi realitas dan interpretasi makna dari sudut pandang para aktor yang terlibat. Metode ini relevan untuk menganalisis dinamika kolaborasi, yang merupakan proses interaktif dan kompleks yang tidak bisa diukur secara kuantitatif. Sebagai metode deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan deskripsi yang kaya dan mendalam mengenai proses kolaborasi, faktor pendorong, dan penghambatnya di TNWK. Kombinasi kualitatif dan deskriptif memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan apa yang terjadi, tetapi juga menjelaskan bagaimana dan mengapa dinamika kolaborasi tersebut terbentuk, sehingga dapat menghasilkan temuan yang kaya akan konteks dan relevan sebagai dasar rekomendasi kebijakan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini difokuskan di kawasan dan sekitar TNWK Lampung Timur. Penelitian dilakukan secara spesifik di Balai TNWK sebagai koordinator utama. Penelitian juga dilakukan di desa penyangga. Adapun desa penyangga yang diteliti adalah desa Labuhan Ratu IX, desa Toto Projo, desa Taman Fajar, desa Tegal Yoso, desa Labuhan Ratu VII, desa Braja Asri dan desa Braja Harjosari..

Selain itu, penelitian juga menjangkau mitra-mitra strategis berupa kantor *Rhino Protection Unit* yang merupakan perpanjangan dari Yayasan Badak Indonesia yang berpusat di Bogor. *Camp Elephant Response Unit* (ERU) yang berada di desa Tegal Yoso, kecamatan Way Bungur, Markas Komando Komunitas untuk Hutan Sumatra, Kantor WCS-IP di desa Labuhan Ratu Dua, kecamatan Way Jepara, Kantor ALeRT di desa Labuhan Ratu Satu dan desa penyangga di sekitar TNWK. Fokus pada lokasi-lokasi ini memungkinkan pengumpulan data yang mendalam mengenai interaksi, pengalaman, dan persepsi dari seluruh pihak yang terlibat secara langsung

3.3 Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis utama antara lain:

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi otentik yang diperoleh secara langsung dari narasumber pada umumnya data primer didapat melalui survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi dan media lain yang digunakan untuk memperoleh data lapangan (Alaslan dkk., 2023). Data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai pihak yang terlibat dalam program konservasi hutan TNWK dimulai dari pihak ALeRT, WCS-IP, KHS-ERU, YABI-RPU, dan YABI-SRS, serta masyarakat desa penyangga di Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Way Kanan, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungur, dan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Kuala Penet yang terlibat langsung dalam kolaborasi dan upaya konservasi hutan Taman Nasional Way Kambas.

Data ini mencakup pandangan, pengalaman pribadi, motivasi, dan persepsi para pihak terkait proses kolaborasi. Selain itu peneliti juga melakukan observasi dengan mengikuti kegiatan kolaborasi, peneliti akan terlibat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan kolaboratif yang relevan

dengan penelitian. Keterlibatan ini memungkinkan peneliti untuk merasakan dan memahami secara mendalam dinamika sosial, interaksi informal, serta proses pengambilan keputusan yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara semata. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman dari sudut pandang partisipan mengenai bagaimana kolaborasi terjalin di lapangan.

b. Data Sekunder

Data ini berfungsi sebagai data pendukung dan validasi yang diperoleh dari data primer. Cakupannya meliputi dokumen kebijakan (undang-undang, peraturan menteri, rencana strategis KLHK, serta publikasi ilmiah dan berita yang relevan. Penggunaan data sekunder akan membantu peneliti membangun konteks penelitian dan memperkuat analisis terhadap data primer.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah dan kerangka teoretis *Collaborative Governance Regime* (CGR) yaitu:

A. Dinamika Kolaborasi pada Program Konservasi di TNWK

Analisis dinamika kolaborasi stakeholder dalam upaya konservasi hutan di TNWK dengan menggunakan 3 dimensi utama model CGR akan menjadi panduan analisis, yaitu:

a. **Konteks Sistem (*System Context*)**

Pada konteks sistem, peneliti mengkaji faktor pemicu (*drivers*) dan kondisi lingkungan (*system condition*) yang melatarbelakangi terbentuknya kolaborasi di TNWK. Hal ini mencakup permasalahan deforestasi, kebakaran hutan, serta konflik manusia dan satwa liar yang merupakan fenomena utama dalam penelitian membentuk urgensi kolaborasi, di mana keterlibatan multi- aktor menjadi jawaban atas keterbatasan kapasitas Balai TNWK jika bekerja sendiri.

b. Dinamika Kolaboratif (*Collaborative Dynamics*)

Menganalisis interaksi internal antar aktor, yang meliputi *principled engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action*.

- 1) *Principled Engagement* mengidentifikasi bagaimana forum dialog, mekanisme musyawarah, dan kegiatan koordinasi mampu menciptakan saling pengertian, membangun kepercayaan, serta mengelola perbedaan kepentingan.
- 2) *Shared Motivation* menganalisis bagaimana aktor-aktor seperti Balai TNWK, NGO (WCS, YABI, ALeRT, KHS), serta masyarakat lokal membangun rasa tujuan bersama, legitimasi kolaborasi, dan komitmen berkelanjutan.
- 3) *Capacity for Joint Action* mengkaji sejauh mana kapasitas kolaboratif terbentuk melalui penyediaan sumber daya (dana, tenaga, pengetahuan), pembagian peran, serta struktur kelembagaan yang mendukung keberlangsungan inisiatif kolaborasi.

c. Tindakan Kolaboratif (*Collaborative Actions*)

Tindakan kolaboratif berfokus pada program konservasi yang dijalankan bersama, seperti patroli gabungan, pencegahan kebakaran hutan, penguatan kelompok tani hutan (KTH), program mitigasi konflik antar manusia dan satwa, serta kegiatan restorasi ekosistem. Penelitian juga menilai bagaimana mekanisme koordinasi operasional di lapangan dilakukan, bagaimana hasil kolaborasi terukur dalam mengurangi ancaman terhadap hutan, serta bagaimana dampak kolaborasi tersebut memperkuat legitimasi para aktor dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar taman nasional. Menganalisis tantangan yang memengaruhi keberlangsungan kolaborasi *stakeholder* baik tantangan internal maupun eksternal.

B. Tantangan Kolaborasi

Penelitian ini memfokuskan pengamatan pada identifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kerja sama antara Balai TNWK, mitra NGO, dan masyarakat. Adapun aspek-aspek tantangan yang akan ditelaah meliputi:

a. Dinamika Administratif dalam Organisasi

Menelaah bagaimana prosedur birokrasi dan regulasi internal kementerian berinteraksi dengan kebutuhan pengelolaan di tingkat tapak, terutama dalam hal kecepatan pengambilan keputusan pada situasi darurat di lapangan.

b. Keberlanjutan Dukungan dan Sumber Daya

Menggali sejauh mana skema ketergantungan antar-aktor terkait pendanaan, teknologi, dan tenaga ahli memengaruhi kemandirian pengelolaan kawasan dalam jangka panjang.

c. Faktor Sosiologis dan Ekonomi Masyarakat

Mengidentifikasi potensi hambatan di tingkat desa penyangga, khususnya mengenai kerentanan komitmen masyarakat dalam menjaga kawasan apabila dihadapkan pada tekanan pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari.

d. Stabilitas Hubungan dan Kepercayaan Antar-Aktor

Menyelidiki faktor-faktor yang dapat memicu pasang-surutnya kepercayaan (*trust*) di antara para pemangku kepentingan, termasuk pengaruh konsistensi komunikasi dan kehadiran personel di lokasi konflik.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Catherine Marshall dan Gretchen B. Rossman dalam (Ahyar et al., 2011) menyebutkan bahwa metode fundamental yang diandalkan oleh peneliti kualitatif untuk mengumpulkan informasi adalah partisipasi dalam latar, observasi langsung, wawancara mendalam, dan tinjauan dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan secara komprehensif dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Teknik ini menjadi instrumen utama untuk mendapatkan data primer yang kaya dan mendalam. Wawancara dilakukan dengan sejumlah informan kunci (*key informants*) yang dipilih secara purposif berdasarkan kriteria pengetahuan dan keterlibatan langsung mereka dalam kolaborasi. Berikut ini adalah informan yang akan diwawancarai.

Tabel 3. 1 Daftar informan

No	Inisial Nama	Jabatan
1.	NZ	Koordinator lapangan KHS
2.	MR	Staff KHS-ERU dan mahout senior Balai TNWK
3.	ES	<i>Social Team Leader ALeRT</i>
4.	SMG	Staf YABI bagian keamanan di TNWK
5.	HP	Staf YABI bagian survey dan pencaian badak di TNWK
6.	PGP	Staf YABI bagian data
7.	ESR	Tim lapangan <i>smart patrol</i>
8.	AG	Tim <i>Wildlife Response Unit</i>
9.	SHD	KTH
10.	ND	KTH
11.	DD	KTH
12.	D	Masyarakat desa penyangga
13.	TM	Masyarakat desa penyangga

14.	ST	Masyarakat desa penyangga
15.	THR	Masyarakat desa penyangga
16.	JMN	Masyarakat desa penyangga
17.	EK	Masyarakat desa penyangga
18.	SP	Staf lapangan TNWK
19.	RH	MMP Linhut
20.	SO	MMP Gajah

Sumber: Diolah peneliti 2025

b. Observasi Langsung (*Direct Observation*)

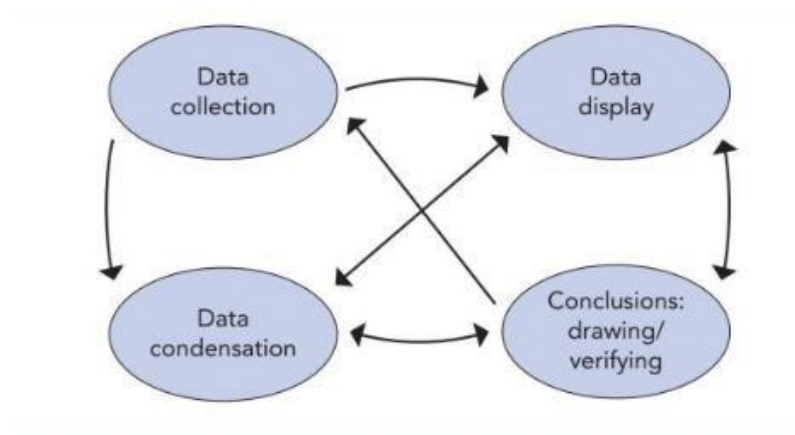
Peneliti melakukan pengamatan dengan terjun langsung dalam kegiatan kolaborasi di lapangan. Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah beberapa kegiatan *volunteering* bersama lembaga donor mitra, kegiatan patroli di SPTN Wilayah II, *community patrol* SPTN Wilayah III, edukasi siswa di desa penyangga, penanaman pohon, dan *ground cheking*.

c. Tinjauan Dokumentasi

Tinjauan dokumentasi merupakan data sekunder yang diperoleh peneliti melalui penelusuran dokumen-dokumen resmi dan tidak resmi, seperti peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan lapangan dan serta berita atau publikasi dari media massa yang relevan yang bertujuan untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi.

3.6 Teknik Analisis Data

Data kualitatif yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) dengan tahapan utama sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Teknik analisis data

Sumber: (Miles, Huberman, & Saldana, 2014)

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Sesuai dengan panduan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) proses pengumpulan data dalam penelitian ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga analitis sejak awal karena peneliti telah terlibat langsung dalam interpretasi fenomena yang diamati selama di lapangan. Data primer telah diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan mitra strategis, masyarakat, Kelompok Tani Hutan (KTH), dan pihak Balai TNWK selaku koordinator utama kolaborasi. Wawancara tersebut telah berhasil menggali pengalaman, persepsi, serta berbagai hambatan dan peluang yang dihadapi oleh masing-masing aktor dalam kolaborasi konservasi.

Selain wawancara mendalam, data primer juga telah dikumpulkan melalui observasi partisipatif pada berbagai aktivitas konservasi yang tengah berjalan. Peneliti melakukan observasi pada kegiatan yang berkaitan dengan program konservasi seperti patroli darat dan patrol air dengan sistem grid, rehabilitasi ekosistem, dan kegiatan edukasi. Observasi yang telah dilakukan memungkinkan peneliti untuk memahami secara langsung interaksi antar-aktor, mekanisme koordinasi, serta bentuk kontribusi nyata yang diberikan di lapangan.

Data sekunder berupa dokumentasi telah dikumpulkan, meliputi laporan kegiatan, berita dari publikasi massa yang relevan, dan peraturan perundang-undangan terkait, serta arsip kegiatan konservasi lainnya. Data tersebut berfungsi untuk memperkuat dan memvalidasi temuan yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi. Dengan memadukan wawancara, observasi, dan dokumentasi, data yang diperoleh telah memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika kolaborasi *stakeholder* dalam konservasi di TNWK.

b. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Tahapan ini merupakan proses sistematis untuk memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasi data mentah yang terkumpul. Proses ini melibatkan pengkodean (*coding*) terhadap transkrip wawancara dan catatan lapangan untuk mengidentifikasi kategori dan tema-tema kunci yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis, tabel, atau matriks. Tujuan dari penyajian ini adalah untuk memudahkan peneliti melihat pola, hubungan, dan temuan-temuan penting di antara berbagai data yang ada.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap akhir ini adalah proses penarikan kesimpulan yang bersifat tentatif dan kemudian diverifikasi kembali. Peneliti akan melakukan interpretasi terhadap temuan-temuan yang ada, menghubungkannya dengan teori CGR untuk menjawab rumusan masalah, dan merumuskan kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Konsep validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif diukur dengan kriteria keabsahan data (*trustworthiness*). Keabsahan data merupakan kriteria fundamental untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan menggunakan empat kriteria utama yaitu uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas, untuk menguji keabsahan data kualitatif peneliti menggunakan kriteria utama tersebut pada konteks penelitian kolaborasi di TNWK (Sugiyono, 2013).

a. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas bertujuan untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan fakta dan kondisi di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan uji kredibilitas dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan triangulasi.

1). Perpanjangan Pengamatan

Peneliti melakukan perpanjangan pengamatan untuk meningkatkan derajat kepercayaan (*credibility*) data dengan kembali ke lokasi penelitian dalam dua fase waktu yang berbeda. Fase pertama dilaksanakan pada Juni hingga Agustus 2025, dan dilanjutkan pada fase kedua dari Oktober 2025 hingga Januari 2026. Melalui durasi kehadiran yang lebih panjang dan berulang ini, peneliti dapat membangun hubungan yang lebih mendalam (*rapport*) dengan petugas Balai TNWK, mitra LSM, dan masyarakat desa penyangga. Hal ini memungkinkan peneliti untuk melakukan pengecekan silang secara detail terhadap data yang dianggap meragukan, sekaligus memastikan bahwa fenomena kompleks seperti dinamika ekonomi dan beban psikologis warga telah terekam secara utuh sesuai dengan kondisi riil di lapangan tanpa adanya distorsi informasi

2) Peningkatan Ketekunan dalam Penelitian

Peneliti melakukan observasi dan wawancara secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk merekam setiap detail dari dinamika kolaborasi yang diamati dan faktor yang memengaruhi kolaborasi sehingga memungkinkan peneliti untuk membedakan antara informasi yang relevan dan yang tidak, serta fokus pada elemen-elemen kunci dari model CGR. Peningkatan ketekunan dilakukan dengan cara melakukan verifikasi data lapangan secara mendalam dan berkelanjutan kemudian peneliti menelaah data secara analitis untuk memastikan validitas sehingga deskripsi yang dihasilkan benar- sesuai dengan fakta empiris di lokasi penelitian.

3) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan peneliti dengan cara mengecek kembali data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber informasi yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan data hasil wawancara antara pihak regulator pihak pelaksana teknis. Perbedaan perspektif dari ketiga pilar aktor tersebut dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan kesimpulan yang utuh mengenai dinamika dan tantangan tata kelola kolaboratif di TNWK

b. Uji Transferabilitas

Uji transferabilitas dalam penelitian ini berkaitan dengan kriteria derajat kekuatan generalisasi temuan penelitian pada konteks atau situasi lain yang memiliki karakteristik serupa. Penelitian ini berfokus pada dinamika kolaborasi di TNWK yang bersifat sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi yang mendalam agar temuan ini dapat diaplikasikan pada konteks lain yang serupa (*transferable*)

c. Uji Dependabilitas

Uji dependabilitas dalam penelitian ini menekankan pada aspek konsistensi a untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian penelitian berjalan secara stabil dan sistematis. Hal ini dilakukan dengan menjaga keterkaitan logis antara rumusan masalah mengenai dinamika kolaborasi di TNWK, prosedur pengumpulan data, hingga proses penarikan kesimpulan, sehingga apabila penelitian ini dilakukan kembali oleh pihak lain dalam konteks dan situasi yang serupa, maka akan dihasilkan temuan yang tetap konsisten dan sejalan dengan data asli yang ditemukan di lapangan.

4 Uji Konfirmabilitas

Uji konfirmabilitas dalam penelitian ini berkaitan dengan aspek objektivitas untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar didasarkan pada data yang ditemukan di lapangan dan bukan merupakan prasangka atau subjektivitas peneliti. Hal ini dilakukan dengan menghubungkan setiap temuan dan simpulan mengenai dinamika kolaborasi di TNWK secara transparan dengan data pendukung, baik yang bersumber dari hasil wawancara informan, catatan observasi, maupun dokumen kebijakan, sehingga validitas hasil penelitian sepenuhnya bergantung pada keaslian informasi yang diberikan oleh para aktor yang terlibat dalam kolaborasi tersebut.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dinamika kolaborasi *stakeholder* dalam program konservasi di TNWK disimpulkan sebagai sebuah rezim tata kelola yang bersifat adaptif dan berkelanjutan, yang lahir dari tekanan krisis ekologis serta keterbatasan kapasitas negara. Kolaborasi ini bekerja melalui kerangka regulasi yang kuat sebagai landasan legal, namun keberhasilannya di lapangan sangat ditentukan oleh proses *principled engagement* yang mampu mengubah pola komunikasi dari formal birokratis menjadi persuasif dan kultural. Transformasi perilaku masyarakat dari aktor yang mengancam kawasan menjadi mitra pelindung hutan merupakan hasil utama dari dinamika motivasi bersama dan pembagian kapasitas yang efektif antar-aktor. Sinergi antara otoritas pemerintah, sokongan teknologi NGO, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam tindakan kolaboratif yang terintegrasi telah berhasil menekan gangguan kawasan secara signifikan. Meskipun demikian, rezim kolaborasi ini masih berada pada tingkat yang rentan akibat ketergantungan sumber daya pada pihak eksternal dan risiko kembalinya masyarakat pada aktivitas ilegal jika manfaat ekonomi dan sosial tidak terjaga secara konsisten.

Meskipun telah menunjukkan kinerja yang signifikan, keberlanjutan rezim kolaboratif di TNWK masih menghadapi sejumlah tantangan kritikal yang memengaruhi stabilitas tata kelola di masa depan. Tantangan administratif muncul dari karakter birokrasi yang prosedural sehingga berpotensi memperlambat respons terhadap situasi darurat di lapangan. Selain itu, terdapat ketergantungan struktural yang tinggi terhadap pendanaan donor internasional untuk mendukung operasional mitra non-pemerintah, yang menciptakan kerentanan apabila terjadi perubahan kebijakan pendanaan global.

Di tingkat tapak, tekanan ekonomi masyarakat desa penyangga tetap menjadi ancaman nyata yang dapat memicu kembalinya aktivitas ilegal jika program kolaborasi gagal memberikan kesinambungan manfaat sosial dan ekonomi. Terakhir, tantangan dalam menjaga konsistensi kepercayaan menunjukkan bahwa kolaborasi memerlukan kehadiran personel secara berkelanjutan agar komitmen yang telah terbangun antara pengelola kawasan dan masyarakat tidak mengalami degradasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, saran yang dapat diajukan ada beberapa hal:

1) Bagi Balai TNWK

Diharapkan dapat melembagakan strategi anjungsana menjadi prosedur tetap dalam pembinaan masyarakat agar kepercayaan warga tetap terjaga secara berkelanjutan, serta mempermudah akses administratif bagi mitra dalam kegiatan patroli gabungan dan memberikan atensi lebih baik lagi kepada masyarakat desa penyangga terkhusus desa yang sangat rawan mengalami konflik.

2) Bagi Mitra Konservasi (*NGO*)

Mitra konservasi (*NGO*) disarankan untuk menyusun dan melaksanakan jadwal rutin pemantauan serta perawatan alat halau gajah bersama kelompok masyarakat secara partisipatif. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa alat mitigasi konflik manusia–satwa tetap berfungsi secara optimal dan dapat digunakan secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Selain itu, keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pemantauan dan perawatan diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki, tanggung jawab kolektif, serta kapasitas teknis masyarakat dalam menghadapi konflik manusia–satwa. Dengan demikian, ketergantungan masyarakat terhadap pengadaan bantuan baru yang bersifat eksternal dapat dikurangi, dan rezim kolaborasi konservasi yang dibangun menjadi lebih mandiri dan berkelanjutan.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya perlu mengukur secara komprehensif dampak kolaborasi konservasi terhadap kesejahteraan masyarakat lokal sebagai dasar evaluasi kebijakan publik, guna memastikan bahwa rezim kolaboratif yang dibangun tidak semata-mata berorientasi pada capaian ekologis, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan sosial. Pengukuran tersebut dapat mencakup perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, seperti peningkatan pendapatan, akses terhadap sumber penghidupan alternatif, penguatan kapasitas lokal, serta tingkat partisipasi dan posisi tawar masyarakat dalam proses pengambilan keputusan konservasi. Dengan demikian, hasil penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan konservasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Sukmana, D. J., & Adriani, H. (2011). A “missing” family of classical orthogonal polynomials. In *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* (Vol. 44, Issue 8). <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Alaslan, A., Suharti, B., Laxmi, Rustandi, N., Sutrisno, E., & Rahmi, S. (2023). *Penelitian Metode Kualitatif*. <https://osf.io/preprints/thesiscommons/smrhb>
- ALeRT. (2023). *ALeRT The Alliance of Integrated Forest Conservation*. ALeRT Indonesia. <https://alertindonesia.org/about-us/>
- Anderson, J. E. (2021). Public Policymaking: An Introduction, Ninth Edition. In *American Politics*. <https://doi.org/10.4324/9781003474807-16>
- Andyono, G., Sutanso, D. T., Sumarwan, Y. C., Hertanto, R. W., Rusdianto, Januansyah, M., & Damayanti, E. (2018). *Potensi Keanekaragaman Hayati di Taman Nasional Way Kambas*. Balai Taman Nasional Way Kambas.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ardi Munthe. (2025). *Gajah Liar Rusak 10 Hektare Lahan, Warga Lampung Timur Harapkan Kompensasi*. Liputan 6.

- Darmayani, S., Juniatmoko, R., Martiansyah, I., Puspaningrum, D., Zulkarnaen, R. N., Nugroho, E. D., Pulungan, N. A., Aldyza, N., Rohman, A., Nursia, Hariri, M. R., & Wattimena, M. A. C. (2022). *Dasar-dasar Konservasi*. Widina Bhakti Persada Bandung All Right Reserved Dilarang.
- Duadji, N., & Tresiana, N. (2018). Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.21580/sa.v13i1.2201>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, T. (2015). *Collaborative Governance Regimes*. Georgetown University Press.
- Emerson, K., & Woo, M. I. N. (2022). through Research Informing Practice through Research. *Jurnal Collaborative Governance Regimes*, 1(1), 62–81.
- Evans, K., Meli, P., Zamora-Cristales, R., Schweizer, D., Méndez-Toribio, M., Gómez-Ruiz, P. A., & Guariguata, M. R. (2022). Drivers of success in collaborative monitoring in forest landscape restoration: an indicative assessment from Latin America. *Society for Ecological Restoration*.
- Fisher, J., Stutzman, H., Vedoveto, M., Delgado, D., Rivero, R., Dariquebe, W. Q., Contreras, L. S., Souto, T., Harden, A., & Rhee, S. (2020). Collaborative Governance and Conflict Management: Lessons Learned and Good Practices from a Case Study in the Amazon Basin. *Society & Natural Resources*, 33(4), 538–553. <https://doi.org/10.1080/08941920.2019.1620389>
- Folke, C., Hahn, T., Olsson, P., & Norberg, J. (2005). Adaptive governance of social-ecological systems. *Annual Review of Environment and Resources*, 30, 441–473. <https://doi.org/10.1146/annurev.energy.30.050504.144511>
- Gautama, W. R. (2021). 22 Gajah di Taman Nasional Way Kambas Mati akibat Perburuan Liar. *Suara Lampung*. https://lampung.suara.com/read/2021/10/02/124445/22-gajah-di-taman-nasional-way-kambas-mati-akibat-perburuan-liar?utm_source=chatgpt.com
- Hooghe, L., & Marks, G. (2001). *Multi-Level Governance and European Integration*. Rowman & Littlefield Publishers, Inc. All.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. *Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal KLHK*, 12, 96–97.
- Komunitas Untuk Hutan Sumatera. (2026a). *Way Kambas National Park in Lampung*. Komunitas Untuk Hutan Sumatera. <https://www.khs-csnc.org/our-work/way-kambas-national-park-in-lampung/>
- Komunitas Untuk Hutan Sumatera. (2026b). *Who We Are*. Komunitas Untuk Hutan Sumatera. <https://www.khs-csnc.org/who-we-are/>
- Kornhauser, K., & Hajjar, R. (2024). Shifting power dynamics and decision-making on U.S. National Forests: Oregon forest collaboratives in the era of social forestry. *Forest Policy and Economics*, 168. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2024.103291>
- Kurniawan, B., Rahmatunissa, M., Utami, S. B., & Buchari, R. A. (2024). A Collaborative Governance Perspective in Ecotourism Development in Ujung Kulon National Park, Banten-Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, 3(8), 5775–5787. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.5175>
- McIntyre, K. B., & Schultz, C. A. (2020). Facilitating collaboration in forest management: Assessing the benefits of collaborative policy innovation. *Land Use Policy*, 96. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104683>
- Orth, P. B., & Cheng, A. S. (2018). Who's in Charge? The Role of Power in Collaborative Governance and Forest Management. *Humboldt Journal of Social Relations*, 40(40).
- Ostrom, E., Gardner, R., & Walker, J. (1995). Rules, Games, and Common-Pool Resources. In *The Economic Journal* (Vol. 105, Issue 431, p. 1034). <https://doi.org/10.2307/2235179>
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2006). *Handbook of Public Policy* (Vol. 17). SAGE Publication.
- Prahara, G. C., & Dewi, M. P. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Ekowisata Taman Nasional Kerinci Seblat. *Res Publica: Journal*

- of *Social Policy* ..., 1(1), 11–21.
<http://intropublica.org/index.php/rp/article/view/39%0Ahttps://intropublica.org/index.php/rp/article/download/39/26>
- Prasetya, H. W., Sadono, D., & Hapsari, D. R. (2023). Dinamika Kelompok dan Kemitraan Konservasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan Konservasi dalam Taman Nasional Meru Betiri. *Jurnal Penyuluhan*, 19(02), 1–16.
<https://doi.org/10.25015/19202345323>
- Rahman, B., Pratiwi, A., & Sa'idah, S. F. (2020). Studi Literatur : Peran Masyarakat Terhadap Konservasi Hutan. *Pondasi*, 25(1), 50.
<https://doi.org/10.30659/pondasi.v25i1.13036>
- Ratner, B. D. (2012). *Collaborative governance assessment Item Type monograph*. 8–10. <http://hdl.handle.net/1834/27215>
- Roengtam, S., & Agustiyara. (2022). Collaborative governance for forest land use policy implementation and development. *Cogent Social Sciences*, 8(1).
- Rusdiyanta, Subiyakto, R., & Pujiyono, B. (2022). *Kebijakan Publik: Aktor, Model dan Proses* (Issue January).
- Santosa, Y., & Masyud, B. (2023). *International Journal of Conservation Science Habitat Factors That Determine the Movement of Sumatran Elephants in Way Kambas National Park*. 13(December 2022), 1237–1248. www.ijcs.ro
- Schoon, M., Chapman, M., Loos, J., Speranza, C. I., Kelman, C. C., Aburto, J., Alexander, S., Baggio, J., Brady, U., Cockburn, J., Cundil, G., Lopez, G. G., Hill, R., Robinson, C., Thondhlana, G., Trimble, M., & Whittaker, D. (2021). On the frontiers of collaboration and conflict: how context influences the success of collaboration. *Ecosystems and People*, 17(1).
<https://doi.org/10.1080/26395916.2021.1946593>
- Setiawan, E. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Alas Purwo. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 15(2), 174–187.
<https://doi.org/10.24815/jsu.v15i2.22618>

- Sipongi Kemenhut. (2025). *Indikasi Luas Kebakaran*. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan - Kementerian Kehutanan. <https://sipongi.menlhk.go.id/indikasi-luas-kebakaran>
- Stiawati, T., & Nuraeni, M. (2024). Collaborative Governance in The Development of Mangrove Rehabilitation in Cigorondong Village Sumur District Pandeglang Regency. *Indonesian Journal of Social Science Research*, 5(2), 714–725. <https://doi.org/10.11594/ijssr.05.02.31>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Syahputra Aryadi, F., & Rasya Putra, M. (2024). *the Application of Collaborative Government in a Case Study of Cooperation To Protect Mangrove Forests in Benoa Bay Bali*. August, 265–271.
- Taman Nasional Way Kambas. (2025). *Visi dan Misi Konservasi Taman Nasional Way Kambas*. Konservasi Taman Nasional Way Kambas. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, seperti Polisi Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan, Penyuluh Kehutanan, dan jabatan fungsional lainnya. Kelompok ini memberikan dukungan teknis dan
- Tandir, A. K. A., Hergianasari, P., & Hadiwijoyo, S. S. (2024). Kemitraan Multi Pihak Dalam Pelestarian Ekosistem Hutan di Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(4), 2059–2072.
- Temitope, T. (2023). Investigating Innovative Models of Governance and Collaboration for Effective Public Administration in a Multi-Stakeholder Landscape. *International Journal Papier Public Review*, 4(2), 18–28. <https://doi.org/10.47667/ijppr.v4i2.209>
- United Nations. (2025a). *Goal 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts*. United Nations. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/>
- United Nations. (2025b). *Goal 17: Revitalize the global partnership for sustainable development*. United Nations.

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/globalpartnerships/>

United Nations. (2025c). *Sustainably manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation, halt biodiversity loss*. United Nations. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/>

Wardana, D., Wijaya, M., & Al Hafis, R. I. (2023). Enhancing Collaborative Governance in Managing Grand Forest Park in Riau, Indonesia. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 4(2), 215–228. <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v4i2.208>

Weber, E. P., Lovrich, N. P., & Gaffney, M. (2005). Collaboration, enforcement, and endangered species: A framework for assessing collaborative problem-solving capacity. *Society and Natural Resources*, 18(8), 677–698. <https://doi.org/10.1080/08941920591005034>

Wildlife Conservation Society. (2026a). *Our Work*. Wildlife Conservation Society, 2300 Southern Boulevard Bronx, New York. <https://www.wcs.org/our-work>

Wildlife Conservation Society. (2026b). *Wildlife Conservation Society About Us*. Wildlife Conservation Society, 2300 Southern Boulevard Bronx, New York. <https://www.wcs.org/about-us>

Wulandari, C., Kaskoyo, H., Bakri, S., Safril Ariza, Y., Yoeland Violita, C., & Hartati, P. (2023). The Importance of Community Empowerment through Strengthening Farmer Groups in the Forest Management Unit (KPH) Way Terusan Central Lampung, Lampung Province Indonesia. *Asian Journal of Research in Agriculture and Forestry*, February, 28–37. <https://doi.org/10.9734/ajraf/2023/v9i1194>

Wulandari, C., Yuwono, S. B., Bakri, S., Febryano, I. G., Agustin, Y., Kuswandono, K., Sirait, E. R. N. S., & Rusdianto, R. (2023). Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Kemitraan Konservasi Pemulihan Ekosistem Rawa Bunder di Taman Nasional Way Kambas (TNWK). *Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung*, 2(1), 205. <https://doi.org/10.23960/jpfp.v2i1.6411>